

## KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Jakarta

Tanggal : 28 Januari 2011

Subyek : Banjir

Hal : 06

### Rekomendasi Dewan Normalisasi Sungai Diprioritaskan

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberi 20 rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Dari rekomendasi itu, masalah penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas di Ibu Kota harus menjadi prioritas. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (27/1).

Neneng menyatakan dalam penanganan banjir serta mengatasi kemacetan, Pemprov DKI diminta lebih memprioritaskan penurapan kali dan menyelesaikan program pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) serta mengoptimalkan keberadaan Kanal Banjir Barat (KBB). “Sejalan dengan itu, perlu optimalisasi program normalisasi dan pengerukan kali serta perbaikan saluran air pada musim hujan.”

Pemprov DKI Jakarta juga diminta terus melancarkan penertiban terhadap bangunan liar yang masih berdiri di atas bantaran kali serta menggalakkan kebersihan di lingkungan RT/RW. Untuk mendukung hal itu, pemprov diharapkan dapat menyediakan fasilitas pembuangan sampah seperti tong sampah, gerobak sampah, serta menyediakan tempat pembuangan sampah sementara. Sementara itu, untuk penanganan kemacetan, kata Neneng, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan.

Diantaranya, penegakan peraturan lalu lintas bagi angkutan umum yang kerap berhenti sembarangan maupun bagi kendaraan pribadi yang parkir tidak pada tempatnya. Selain itu, diperlukan juga pembangunan jalan layang dan jalan lintas bawah pada persimpangan yang selama ini dikenal memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas maupun yang dilintasi jalur kereta api. “Kami meminta pemprov lebih mengefektifkan satgas anti kemacetan,” kata Neneng.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyatakan sependapat dan siap melaksanakan rekomendasi Dewan tersebut. “Ke-20 rekomendasi ini bagus semua. Nanti akan kami tindak lanjuti untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.”

Kendati demikian, Prijanto memberi catatan terkait lembaga eksekutif diminta mengambil sikap tegas kepada para pengembang yang mempunyai lahan tidur untuk digunakan sarana olahraga demi kepentingan umum. Menurut Prijanto, lahan tidur tidak bisa dipaksakan, sebab semua itu ada aturannya dan pihaknya sudah menyampaikan secara tersirat pada salah satu anggota DPRD DKI mengenai lahan tidur itu.

mza/P-2